J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol. 4, No. 1, Desember 2024

Implementasi Program Kemandirian Meubel dalam Upaya Mengembangkan Potensi Narapidana

Danielta Winner Barus, Markus Marselinus Soge
[1,2]Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
E-mail: danieltawinner@gmail.com[1], markusmarselinus@gmail.com[2]

Article History:
Received: 10 Desember 2024
Revised: 26 Desember 2024
Accepted: 30 Desember 2024

Keywords: *Implementasi, Potensi, Narapidana, Keterampilan*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi program kemandirian meubel dalam mengembangkan potensi narapidana di Lapas. Program ini dirancang untuk membekali narapidana dengan keterampilan pertukangan, khususnya dalam pembuatan meubel, sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah masa tahanan berakhir. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga dalam menyediakan pelatihan serta pemilihan narapidana peserta berdasarkan minat dan kemampuan. Faktor keberhasilan program mencakup penyediaan alat dan bahan yang memadai, dukungan tenaga instruktur yang kompeten, serta adanya strategi pemasaran produk untuk meningkatkan pendapatan negara melalui PNBP. Program ini diharapkan dapat mengurangi angka residivisme dan membantu narapidana mencapai kemandirian ekonomi.*

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan sebuah tata cara dan pedoman mengenai peradilan pidana, yang termasuk kedalam sistem peradilan pidana terpadu dengan pemerintah sebagai penyelenggara. Pemasyarakatan dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial meyelengarakan penegakkan hukum dibidang perlakuan terhadap warga binaan, tahanan, maupun anak. Sistem yang dimiliki Pemasyarakatan berupa tatanan akan arah, batas, serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan. Pada dasarnya Pemasyarakatan menjalankan tugas untuk memberikan perlakuan kepada tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya, dengan harus berdasarkan prinsip perlindungan hukum dan menghormati hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan adalah suatu kepastian yang dialami oleh setiap individu manusia. Pada umumnya perubahan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu perubahan yang bersifat mem-bangun atau maju dan perubahan yang bersifat mundur atau menjadi lebih buruk dari yang sebelumnya. Perubahan

sebagai upaya individu untuk menemukan makna dalam kehidupan mereka dan memanfaatkan potensi mereka untuk mengatasi tantangan dan kesulitan (Frankl, 1946). Namun pada kenyataannya sering sekali manusia terjerumus da-lam perubahan yang bersifat negatif dan berujung pada penyimpangan atau bahkan tin-dak pidana. Ketika penyimpangan tersebut mencapai tingkat tindak pidana, maka pene-gakan hukum akan terlibat, dan salah satu langkah yang diambil adalah pembinaan oleh sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan diorganisir untuk memberikan perlindungan kepada narapidana dan memperbaiki kepribadian serta kemandirian mereka. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan mereka akan kesalahan, mendorong perbaikan diri, dan mencegah pengu-langan tindakan kriminal agar mereka dapat hidup secara produktif dan konstruktif se-bagai anggota masyarakat yang bermanfaat dalam proses pembangunan, sambil juga melindungi masyarakat dari risiko pengulangan tindakan kriminal. Pelanggaran hukum akan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan institusi-institusi seperti pengadi-lan, kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, dan kepolisian (Sunia et al., 2022). Pemasyara-katan adalah perkembangan dari sistem pemidanaan di Indonesia, yang bertujuan untuk memperbaiki hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana melalui pembinaan.

Melalui Bengkel Kerja Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyalurkan Potensi yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Bengkel Kerja juga menyediakan per-lengkapan-perlengkapan serta bahan baku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pro-gram-program keterampilan kerja. Meubel merupakan salah satu jenis kegiatan dari pem-binaan kemandirian yang tergolong kedalam kategori pertukangan kayu. Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), kegiatan pembuatan meubel menjadi salah satu inisiatif yang membangun kemandirian narapidana. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan teknis dalam kerajinan kayu, tetapi juga menciptakan peluang untuk pengembangan ket-erampilan dan penguatan nilai-nilai positif.

Dengan mempertimbangkan konteks yang ada, peneliti bermaksud untuk menyelidiki tentang "Implementasi Program Kemandirian Meubel dalam Upaya Mengembangkan Potensi Narapidana". Tujuan penelitian ini adalah agar peneliti memahami bagaimana implementasi program kemandirian meubel dalam usaha mengembangkan potensi narapidana bagaimana proses pelaksanaan kegiatan meubel tersebut, serta bagaimana cara mengatasi segala bentuk faktor penghambat dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian meubel dalam upaya peningkatan potensi narapidana.

LANDASAN TEORI

Teori Implementasi Program

Implementasi program dapat dilihat dari berbagai pendekatan atau perspektif. Terdapat banyak model yang dapat digunakan untuk melihat keefektifan implementasi dari berbagai perspektif para ahli. Menurut David C. Korten dalam akib dan Tarigan (2008:12) yaitu model kesesuaian korten menggunakan pendekatan proses pengajaran serta biasa disebut model ketepatan implementasi program (Tarigan, 2008). David C. Korten menyatakan bahwa model ini memiliki tiga elemen, mengaplikasikan program serta pengelompokan tujuan program. Untuk memulai adanya hubungan antara output program dan manfaat yang dimaksudkan (beneficiaries). Yang kedua adalah keselarasan antara program dan badan penyelenggara yang lebih dikenal dengan terdapat perjanjian antara program yang dapat dilaksanakan oleh badan pelaksana program. Selanjutnya yaitu kesepakatan organisasi pelaksana dengan kelompok sasaran yang mendapat manfaat dari program. Terdapat keseimbangan antara kebutuhan program yang terdapat pada organisasi untuk menerima hasil dan manfaat. Program yang dapat dipenuhi oleh anggota tim program (Korten & Sjahrir, 1988).

Menurut teori yang diajukan korten, keberhasilan kinerja program tidak akan tercapai sesuai harapan apabila tidak adanya keselarasan diantara ketiga elemen implementasinya. Maka, output program pasti tidak akan mencapai tujuan jika tidak memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. Jika organisasi pelaksana program tidak dapat memenuhi kebutuhan program, sehingga kelompok tidak memiliki kemampuan menyampaikan output program dengan sesuai. Jika kumpulan yang hendak dicapai tidak dapat memperoleh syarat penetapan pelaksanaan. Maka, kelompok yang hendak dituju tidak mendapatkan output program. Dalam menjalankan suatu program dengan planning yang telah disusun, penting untuk menjamin kesesuaian antara tiga komponen implementasinya. Maka, keselarasan diantara ketiga implementasi program menjadi suatu keharusan mutlak agar program dapat berjalan sesuaian dengan rencana awal.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif juga dikenal sebagai penelitian investigatif karena peneliti secara langsung mengumpulkan data dengan berinteraksi secara langsung dengan responden dan melakukan observasi di lokasi penelitian (Agusta, 2003). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam metode kualitatif untuk menguraikan kondisi sebenarnya di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam yang terkait dengan penerapan program pembinaan ke-mandirian. Data kualitatif akan diperoleh dari informasi yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian. Hal ini dapat berupa tentang bagaimana pengembangan potensi narapidana melalui bidang keterampilan kerja yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Peneliti dapat menggali data sebanyak mungkin sesuai dengan objek yang ada di lokasi penelitian. Seorang peneliti harus memiliki pengetahuan mendalam tentang teori dan wawasan yang luas untuk dapat mengajukan pertanyaan yang tepat, menganalisis, dan menggambarkan dengan detail serta makna yang dalam situasi sosial yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dalam bentuk deskripsi, baik itu dalam bentuk catatan tertulis maupun lisan dari partisipan, serta melibatkan observasi terhadap perilaku

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif dalam metodologi kualitatif, dengan menggunakan pendekatan ini peneliti yakin akan mampu menganalisis dan mengkarak-terisasi situasi yang sedang terjadi beserta data yang tersedia di lapangan. Pendekatan ini digunakan pada kondisi objek yang alami dan peneliti merupakan kunci dari penelitian sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2015). Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan sebuah penelitian yang memiliki fundamental filsafat postpositivisme.

Manfaat dari penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif adalah Memberi gambaran yang kaya dan mendalam tentang suatu fenomena. Dapat digunakan untuk meneliti fenomena yang kompleks dan sulit diukur dan memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif dan pengalaman orang yang terlibat dalam fenomena.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi program kemandirian meubel dalam upaya mengembangkan potensi narapidana di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam diwujudkan dengan hal hal sebagai berikut:

1. Kerja sama pelaksanaan pelatihan kegiatan meubel dengan pihak ketiga

   Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian produksi meubel ini tidak serta merta berjalan dengan begitu saja. Beberapa pihak yang terlibat dalam pembinaan ini seperti narapidana sebagai pelaksana atau pekerja, petugas Lapas sebagai pengawas dan fasiliator serta salah satu upaya yang dilakukan lapas kelas IIB Lubuk pakam untuk mengoptimalkan

kegiatan produksi meubel dan hasil dari kegiatan produksi meubel tersebut, Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam mengambil langkah kerjasama dengan pihak ketiga yang menyediakan pelatihan bagi warga binaan untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh warga binaan sebagai kelompok sasaran program yang dilaksanakan. Hal ini dapat memudahkan program pembinaan berjalan dengan optimal.

Kerja sama pelaksanaan pelatihan kegiatan meubel antara lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan pihak ketiga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian narapidana. Melalui kolaborasi ini, narapidana diajarkan keterampilan teknis dalam pembuatan meubel, seperti meja, kursi, dan lemari, yang dapat membantu mereka beradaptasi setelah menjalani masa hukuman. Pihak ketiga, yang bisa berupa lembaga non-pemerintah, perusahaan meubel, atau organisasi sosial, berperan penting dalam menyediakan materi pelatihan, peralatan, dan supervisi yang diperlukan selama proses pembelajaran. Manfaat dari kerja sama ini sangat signifikan; bagi narapidana, mereka mendapatkan keterampilan baru yang membuka peluang kerja atau usaha setelah bebas, sementara Lapas dapat meningkatkan reputasi dan efektivitas program rehabilitasi, serta mengurangi tingkat residivisme. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga kewirausahaan, termasuk manajemen usaha dan pemasaran, untuk mempersiapkan narapidana dalam dunia kerja yang kompetitif. Untuk memastikan keberhasilan program, penting adanya sistem monitoring dan evaluasi yang dapat mengukur perkembangan peserta serta efektivitas pelatihan. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi juga membantu mengurangi stigma terhadap narapidana dan mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, sehingga berdampak positif terhadap pengurangan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.

2. Pemilihan narapidana pelaksana kegiatan kemandirian oleh petugas bimker

Kegiatan program kemandirian meubel yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dimulai dari pelaksanaan pemilihan narapidana yang akan melaksanakan program kegiatan tersebut. Pemilihan ini dilakukan oleh petugas bimker yaitu staff bimker dengan membuat pengumuman kepada para narapidana bagi siapa yang berminat atau berkeinginan untuk belajar terkait kerajinan meubel maka dapat melaporkan dirinya kepada staff bimker.

Pemilihan narapidana pelaksana kegiatan kemandirian meubel oleh petugas bimbingan kerja (bimker) merupakan tahap krusial dalam program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Proses ini melibatkan penilaian terhadap keterampilan, minat, dan motivasi narapidana untuk memastikan bahwa mereka benar-benar siap mengikuti pelatihan. Petugas bimker melakukan wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi narapidana yang memiliki potensi dan keinginan untuk belajar, serta untuk berkontribusi dalam kegiatan produksi meubel. Selain itu, faktor-faktor seperti sikap, disiplin, dan rekam jejak selama menjalani hukuman juga menjadi pertimbangan penting. Dengan memilih narapidana yang tepat, program ini dapat lebih efektif dalam menciptakan keterampilan yang berguna bagi mereka di masa depan, sekaligus mendorong rasa tanggung jawab dan kemandirian. Melalui pendekatan yang selektif ini, diharapkan narapidana tidak hanya mampu mengembangkan kemampuan teknis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani masa pidana.

3. Penyediaan alat dan bahan kegiatan kemandirian meubel serta pembiayaan yang dilaksanakan oleh staff bimker pokja meubel

Pelaksanaan program kegiatan meubel di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam tentunya

memerlukan anggaran guna belanja bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. Penyediaan alat dan bahan untuk kegiatan kemandirian di bidang meubel merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan program pelatihan keterampilan di lembaga pemasyarakatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan praktis kepada warga binaan, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan di bidang meubel dan memiliki peluang lebih besar untuk bekerja secara mandiri atau mendapatkan pekerjaan di industri meubel setelah kembali ke masyarakat. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh staf bimbingan kerja (bimker) yang tergabung dalam kelompok kerja (pokja) meubel, yang memiliki tugas untuk mengatur seluruh aspek operasional terkait penyediaan alat, bahan, dan dukungan pembiayaan yang diperlukan.

Proses penyediaan alat dan bahan untuk kegiatan ini meliputi beberapa tahap. Pertama, dilakukan perencanaan kebutuhan, yang mencakup identifikasi jenis dan jumlah alat serta bahan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan produksi meubel. Alat-alat yang umumnya digunakan antara lain gergaji, mesin pemotong kayu, bor listrik, paku tembak, palu, dan alat pertukangan lainnya, sementara bahan-bahan yang dibutuhkan meliputi kayu berbagai jenis, paku, lem kayu, cat, pernis, amplas, dan aksesoris furnitur. Staf bimker bertanggung jawab untuk memastikan alat dan bahan tersebut tersedia dalam kondisi baik, dengan kualitas yang sesuai standar agar dapat digunakan secara optimal. Penyediaan ini juga mencakup pemeliharaan dan perbaikan alat-alat yang sudah ada agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama, serta penggantian alat yang rusak atau sudah tidak layak pakai.

Selain penyediaan alat dan bahan, aspek pembiayaan juga memainkan peran krusial dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan kemandirian meubel. Sumber pembiayaan untuk kegiatan ini biasanya berasal dari anggaran lembaga pemasyarakatan, yang dialokasikan untuk program pembinaan warga binaan, serta dari program pemerintah atau lembaga sosial yang memiliki fokus pada pelatihan keterampilan dan pengembangan masyarakat. Di beberapa kasus, lembaga pemasyarakatan juga menerima bantuan atau donasi dari pihak swasta, organisasi non-pemerintah, atau individu yang ingin berkontribusi pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan. Setiap dana yang diterima dan digunakan untuk kegiatan ini harus dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dengan pencatatan yang jelas serta pelaporan yang rutin untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

4. Adanya mekanisme pelaksanaan kegiatan kemandirian meubel sesuai dengan SOP yang berlaku di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam

Kegiatan meubel yang dilaksanakan pada Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam dilakukan 3 kali dalam seminggu. Kegiatan biasanya berlangsung pada hari selasa, rabu, dan kamis. Namun hal tersebut juga bersifat kondisional bergantung pada jumlah pesanan yang ada. Apabila mendapat pesanan dari pihak eksternal atau luar lapas dan pemesan meminta untuk diselesaikan sesegara mungkin, maka untuk kegiatan meubel juga dapat dilaksanakan lebih dari 3x seminggu atau bahkan setiap hari untuk memenuhi target dari pembeli. Walaupun demikian, warga binaan yang melaksanakan kegiatan produksi meubel ini tetap mematuhi aturan yang berlaku di lapas seperti menghentikan kegiatan apabila sudah tiba saatnya untuk kembali ke dalam sel ataupun saat pelaksanaan apel pengecekan. Kegiatan berlangsung mulai dari jam 8 Pagi setelah pelaksanaan apel warga binaan dan sel telah dibuka agar warga binaan dapat beraktifitas diluar sel. Kemudian warga binaan akan kembali kedalam sel untuk pelaksanaan apel siang pada jam 1 siang untuk memastikan kelengkapan jumlah warga binaan yang ada pada sel tersebut. Setelah itu sel akan dibuka kembali pada pukul 14.30

setelah dan warga binaan dapat melanjutkan aktifitas di luar sel hingga pukul 17.30. Apabila sudah pukul 17.30 warga binaan akan kembali kedalam sel dan kegiatan kemandirian meubel akan dilanjutkan keesokan harinya.

Lapas Lubuk Pakam juga menerapkan sistem absensi untuk memastikan warga binaan yang mengikuti kegiatan program kemandirian meubel ini mengikuti kegiatan dan apabila tidak hadir bisa dipastikan alasan ketidakhadirannya. Absensi yang dilakukan secara manual melalui pencatatan pada buku absensi yang digabung bersamaan dengan kegiatan kemandirian lainnya seperti pembuatan ulos, menjahit, loundry yang dilakukan setiap mulai melakukan kegiatan di pagi hari.

5. Penyediaan tempat pemasaran hasil kemandirian meubel oleh Lapas kelas IIB Lubuk Pakam

Kegiatan program kemandirian meubel di Lapas Kelas IIB Lubuk pakam juga tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan warga binaan yang ada didalam lapas, tetapi juga menjawab panggilan dan permintaan dari masyarakat sekitar. Pemajangan hasil karya warga binaanj dilakukan dengan menampilkan seluruh hasil karya di ruangan kunjungan. Dengan demikian banyak masyarakat baik pihak keluarga maupun pihak lainnya yang dapat melihat berbagai jenis hasil produksi warga binaan. Apabila mereka tertarik untuk membeli, mereka akan menghubungi petugas setempat dan petugas yang mengawasi jalannya kunjungan tersebut akan menyampaikannya kepada petugas dibagian bimker. Petugas bimker pun akan menyampaikan berbagai informasi seperti harga terkait produk yang diminati, dan juga menawarkan kepada masyarakat apabila mereka membutuhkan sesuatu seperti kursi lipat, meja kecil atau produk meubel lainnya mereka dapat memesannya di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam. Hingga saat ini cukup banyak masyarakat yang tertarik karena melihat kualitas yang standar dengan harga yang relatif murah daripada toko diluar. Mereka juga ingin turut serta dalam memberi dukungan dan apresiasi terhadap hasil karya anak didik atau warga binaan lapas.

6. Kegiatan kemakndirian meubel dapat memenuhi PNBP yang diharapkan

Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam telah berhasil memenuhi target pencapaian penjualan. Hal tersebut dibuktikan dengan kemampuan lapas dalam memberikan PNBP atau pendapatan negara bukan pajak. PNBP menjadi bukti bahwa kegiatan kemandirian meubel yang dilaksanakan pada Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam sudah berjalan cukup optimal.

Kegiatan kemandirian meubel di lembaga pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi warga binaan, tetapi juga berperan strategis dalam mendukung penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Program ini dirancang agar warga binaan dapat menghasilkan produk meubel yang berkualitas, seperti meja, kursi, lemari, rak, dan berbagai perabot rumah tangga lainnya, yang dapat dipasarkan secara komersial. Penjualan produk-produk meubel tersebut berkontribusi langsung terhadap PNBP, karena hasil penjualannya disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan dan produktivitas warga binaan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang konkret bagi lembaga pemasyarakatan dan negara.

Untuk dapat mencapai target PNBP yang diharapkan, beberapa langkah penting perlu dilaksanakan secara efektif. Pertama, aspek perencanaan produksi harus dikelola dengan baik, dimulai dari pemilihan bahan baku yang berkualitas dan efisien. Kayu sebagai bahan utama meubel harus dipilih berdasarkan jenis dan kualitas yang sesuai dengan produk yang ingin dihasilkan, misalnya kayu jati untuk produk premium atau kayu lapis untuk produk dengan harga lebih terjangkau. Pengelolaan bahan baku yang optimal akan mengurangi biaya

produksi dan meningkatkan nilai tambah produk akhir. Selain itu, staf bimbingan kerja (bimker) bersama dengan kelompok kerja (pokja) meubel bertugas mengelola alur kerja produksi secara efektif, mulai dari pembuatan desain, proses pemotongan, perakitan, hingga finishing produk untuk memastikan bahwa semua tahapan dilaksanakan dengan standar mutu yang tinggi.

Selanjutnya, aspek pemasaran memegang peranan krusial dalam meningkatkan PNBP dari kegiatan kemandirian meubel. Produk meubel yang dihasilkan harus dipromosikan dan dipasarkan dengan strategi yang tepat, termasuk melalui pameran produk, kerja sama dengan distributor meubel, serta pemasaran online melalui media sosial atau e-commerce. Kerja sama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, sekolah, atau perusahaan swasta juga dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas pangsa pasar. Produk meubel dari lembaga pemasyarakatan dapat dipasarkan sebagai perabot dengan kualitas yang baik dan harga yang kompetitif, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga mendukung program rehabilitasi sosial. Dengan meningkatkan jangkauan pemasaran, potensi penjualan dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan PNBP.

Pembahasan

Implementasi program kemandirian meubel di lembaga pemasyarakatan dapat dianalisis melalui tiga dimensi dalam Teori Implementasi David C. Korten, yaitu dimensi program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran. Masing-masing dimensi memberikan pandangan yang komprehensif mengenai bagaimana program tersebut dijalankan dan dampaknya terhadap pengembangan potensi narapidana.

1. Dimensi Program

Dimensi program mencakup perencanaan, tujuan, serta strategi pelaksanaan dari kegiatan kemandirian meubel. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan pelatihan keterampilan di bidang pertukangan dan produksi meubel kepada narapidana, sehingga mereka dapat memiliki keterampilan yang berguna untuk bekerja atau berwirausaha setelah masa hukuman berakhir. Program ini dirancang agar narapidana dapat belajar secara langsung tentang proses pembuatan meubel, mulai dari tahap dasar seperti pemilihan bahan, desain, pemotongan kayu, perakitan, hingga finishing produk.

Dalam implementasinya, program kemandirian meubel perlu dirancang dengan metode yang komprehensif, mencakup aspek praktis dan teoritis. Kurikulum pelatihan harus disesuaikan dengan standar industri meubel untuk memastikan keterampilan yang diajarkan relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, harus ada upaya untuk mengukur efektivitas program, misalnya melalui evaluasi keterampilan narapidana secara berkala, pencapaian target produksi, dan keberhasilan produk dalam memenuhi standar kualitas. Kesuksesan program ini juga ditandai dengan mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi yang dapat dipasarkan, sehingga berkontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta memberikan pendapatan tambahan bagi lembaga.

Hambatan yang mungkin muncul dalam dimensi program adalah keterbatasan dana untuk pengadaan alat, bahan baku, atau peningkatan sarana pelatihan. Jika alat yang digunakan sudah usang atau bahan yang disediakan tidak mencukupi, maka akan menghambat proses pelatihan dan produksi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya dukungan pembiayaan yang berkelanjutan dan alokasi sumber daya yang optimal. Selain itu, adaptasi kurikulum pelatihan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dalam

industri meubel juga menjadi tantangan yang harus diantisipasi.

2. Dimensi Organisasi Pelaksana

Dimensi organisasi pelaksana berkaitan dengan lembaga atau unit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, termasuk peran staf bimbingan kerja (bimker), instruktur pelatihan, serta dukungan dari lembaga pemasyarakatan secara keseluruhan. Staf bimker dan instruktur harus memiliki keterampilan teknis serta pengalaman di bidang meubel, sehingga mereka dapat memberikan pelatihan yang berkualitas. Kemampuan mereka dalam mengelola alur kerja, memotivasi narapidana, dan mengawasi proses produksi juga sangat menentukan keberhasilan program.

Organisasi pelaksana harus mampu mengatur dengan baik aspek administratif dan operasional dari program ini. Hal ini mencakup pengadaan alat dan bahan secara berkala, perawatan peralatan, serta manajemen waktu pelatihan yang efektif. Selain itu, lembaga pemasyarakatan perlu memiliki kebijakan yang mendukung program ini, seperti menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta mengadopsi sistem reward untuk mendorong partisipasi narapidana dalam pelatihan.

Tantangan dalam dimensi organisasi pelaksana dapat muncul dari kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, keterbatasan tenaga instruktur yang kompeten, atau birokrasi yang menghambat pengadaan alat dan bahan. Dalam beberapa kasus, kekurangan dukungan dari pihak manajemen lembaga pemasyarakatan dapat menyebabkan rendahnya prioritas terhadap program ini, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pelaksanaan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi pelaksana untuk membangun kerjasama yang kuat dengan pihak eksternal seperti lembaga pelatihan atau perusahaan meubel untuk meningkatkan kapasitas program dan menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan industri.

3. Dimensi Kelompok Sasaran

Dimensi kelompok sasaran mencakup narapidana sebagai penerima manfaat dari program kemandirian meubel. Program ini dirancang untuk membantu narapidana dalam mengembangkan keterampilan kerja yang dapat membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat setelah masa tahanan. Melalui pelatihan kemandirian meubel, narapidana tidak hanya memperoleh keterampilan teknis dalam pembuatan meubel, tetapi juga nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja tim. Dengan keterampilan yang diperoleh, narapidana diharapkan mampu bekerja di bidang pertukangan atau bahkan membuka usaha meubel sendiri.

Namun, tantangan dalam dimensi kelompok sasaran berkaitan dengan latar belakang narapidana yang berbeda-beda, baik dari segi usia, tingkat pendidikan, maupun pengalaman kerja. Beberapa narapidana mungkin memiliki kesulitan dalam memahami teknik pertukangan atau tidak memiliki motivasi untuk belajar keterampilan baru karena kurangnya kepercayaan diri atau perasaan putus asa. Oleh karena itu, pendekatan pelatihan yang inklusif dan personalisasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap narapidana mendapatkan manfaat maksimal dari program ini. Program ini juga perlu mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial yang dapat mempengaruhi partisipasi narapidana, misalnya dengan memberikan dukungan psikososial atau konseling yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kesiapan mereka dalam mengikuti pelatihan.

Di sisi lain, penting untuk melakukan pemilihan peserta yang tepat untuk program ini. Narapidana yang dipilih untuk mengikuti pelatihan harus memiliki minat dan kemampuan dasar yang sesuai dengan keterampilan yang akan diajarkan. Proses seleksi yang baik akan

memastikan bahwa program ini diikuti oleh narapidana yang berkomitmen dan memiliki peluang lebih besar untuk sukses dalam mengembangkan keterampilan meubel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan Implementasi program kemandirian meubel di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam merupakan upaya strategis dalam mengembangkan potensi narapidana melalui pelatihan keterampilan di bidang meubel. Program ini dirancang untuk membekali narapidana dengan keterampilan teknis dalam pembuatan meubel, yang dapat membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat setelah bebas. Melalui pendekatan yang komprehensif, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja tim.

Keberhasilan program ini bergantung pada perencanaan yang matang, manajemen organisasi pelaksana yang efektif, serta pendekatan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik narapidana. Dukungan yang memadai dari pihak lembaga pemasyarakatan, termasuk dalam hal penyediaan alat, bahan, dan tenaga instruktur yang kompeten, menjadi faktor kunci yang mempengaruhi hasil pelaksanaan program. Selain itu, adanya strategi pemasaran untuk hasil produk meubel dapat memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan memperkuat keberlanjutan program.

Secara keseluruhan, program kemandirian meubel di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam menunjukkan potensi yang besar dalam memberdayakan narapidana dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang produktif setelah masa tahanan. Melalui peningkatan keterampilan dan dukungan berkelanjutan, diharapkan program ini dapat berkontribusi dalam mengurangi angka residivisme dan membantu narapidana dalam mencapai kemandirian ekonomi.

PENGAKUAN

Puji syukur diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya artikel dengan judul "Implementasi Program Kemandirian Meubel Dalam Upaya Mengembangkan Potensi Narapidana" ini dapat selesai dengan baik. Artikel ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, oleh karena itu peneliti ingin berterima kasih kepada pihak terkait.

Peneliti mengetahui penulisan artikel ini tidak sempurna. Untuk itu peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang bertujuan untuk dapat memperbaiki kekurangan dalam penyusunan artikel. Semoga hasil yang telah diperoleh bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

DAFTAR REFERENSI

Agusta, I. (2003). Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif 1 (11th ed., Vol. 1). Jakarta press.

Frankl, V. (1946). Man's Search for Meaning. Beacon Press.

Korten, D. C., & Sjahrir. (1988). Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Yayasan Obor Indonesia.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo, Ed.). Alfabeta.

Sunia, T., Felix, W., & Jonathan, S. (2022). Detection of inconsistency between shape and motion in realistic female and male animation. Stem Fellowship Journal, 1(1), 5–18.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.